

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang dapat diukur dari kemajuan kualitas pendidikannya. Optimalisasi peran pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sudah dilakukan, namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pencapaian standar nasional pendidikan.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, melalui standarisasi pendidikan nasional, pengembangan kurikulum nasional dan lokal, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui latihan dan pengembangan keprofesian lainnya. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Keberhasilan pendidikan pada satuan mikro di sekolah, seolah bertumpu pada tanggung jawab guru sebagai pengelola proses pembelajaran, padahal selain guru sebagai tenaga pendidik, terdapat pula tenaga pendidikan lainnya yakni kepala sekolah yang bertugas sebagai pimpinan dan manajer utama di lingkungan sekolah serta komponen pengawas sekolah yang bertugas melakukan supervisi baik aspek akademik ataupun aspek manajerial yang secara keseluruhan bertujuan untuk mengawal dan meningkatkan mutu capaian¹Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah, dan Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa:

Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Tugas pengawasan akademik dan manajerial tersebut merupakan tugas pokok yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Tugas pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan ini meliputi kegiatan menyusun program pengawasan satuan pendidikan; melaksanakan pembinaan; pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan; penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan penyusunan laporan pengawasan sekolah.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (4) beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan adalah melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan, yang meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Dalam melakukan tugas pengawasan akademik pengawas sekolah melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian guru agar dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya, sedangkan dalam tugas pengawasan manajerial pengawas sekolah melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian kepala sekolah agar dapat mempertinggi kualitas administrasi dan pengelolaan sekolah untuk terciptanya sekolah yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas sekolah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang berkaitan dengan peningkatan proses pembelajaran, sebagaimana bunyi salah satu tulisan dari Asosiasi Supervisi dan Pengembangan Kurikulum di Amerika yang menyebutkan bahwa:

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Almost all writers agree that the primary focus in educational supervision is and should be the improvement of teaching and learning. The term instructional supervision is widely used in the literature of embody all effort to those ends. Some writers use the term instructional supervision synonymously with general supervision.” (Association for Supervision and Curriculum Development-ASCD, 1987:129)

Pengawas sekolah juga merupakan salah satu komponen dalam peningkatan mutu pendidikan karena kegiatan pengawasan yang dilakukan menyentuh upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan perbaikan manajemen sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Upaya perbaikan proses pembelajaran ini berdampak signifikan pada peningkatan hasil pembelajaran jika pengawas sekolah melakukan dengan supervisi akademik yang efektif. Too, Kimutai, dan Zachariah (2012:306) menyatakan bahwa ”... effective supervision of teachers by head teachers enhances teaching and learning which in the long run improves students' performance in national examinations.”

Kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan sekolah sangat menentukan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kinerja pengawasan ini tentunya harus dibangun melalui ketepatan program-program yang dikembangkan oleh pengawas sekolah melalui proses *need assessment* dan hasil analisis pengawasan sebelumnya, perencanaan program, implementasi program serta prosedur evaluasi yang akurat. Kinerja pengawas juga perlu didukung dengan oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan supervisi di sekolah dapat diimplementasikan dengan baik.

Kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi ini bisa dianggap sebagai bentuk-bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlihatkan oleh pengawas sekolah ketika melaksanakan tugasnya. Seorang pengawas sekolah yang memiliki kompetensi yang baik dapat memberi bimbingan, motivasi, dan arahan kepada guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalismenya.

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/ Madrasah menyebutkan bahwa seorang pengawas sekolah harus memiliki

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

enam dimensi kompetensi yaitu: (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi supervisi akademik; (3) kompetensi supervisi manajerial; (4) kompetensi evaluasi pendidikan; (5) kompetensi penelitian pengembangan; dan (6) kompetensi sosial. Berdasarkan hasil uji kompetensi terhadap pengawas sekolah yang dilakukan Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas (Sekarang Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDMPK&PMP, Kemdikbud), dari keenam kompetensi tersebut hanya dua yang memiliki nilai di atas angka 60 yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, sedangkan kompetensi yang paling menunjang untuk melaksanakan tugas pokok atau tugas utama pengawas masih di bawah angka 60. Bahkan kompetensi utama yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu kompetensi supervisi akademik memiliki nilai yang paling rendah yaitu 52,8. Seperti tergambar dalam diagram berikut:

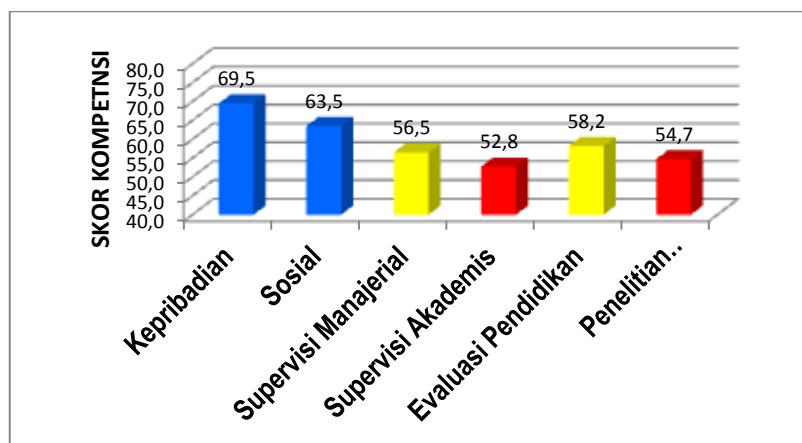


Diagram 1.1 Skor Rata-Rata Kompetensi Pengawas

Sumber: Direktorat Tenaga Kependidikan, Depdiknas (Ditendik, 2010a:5)

Hasil uji kompetensi tersebut mengisyaratkan perlunya pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan semua kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah, khususnya kompetensi supervisi akademik. Karena kompetensi supervisi akademik yang dikuasai oleh pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektifitas dan kualitas proses pembelajaran

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang dilakukan oleh guru yang berujung pada peningkatan kualitas hasil pendidikan.

Selanjutnya, berkaitan dengan hasil uji kompetensi tersebut, kelemahan pengawas sekolah dalam kompetensi supervisi akademik disebabkan oleh beberapa faktor baik kondisi maupun kendala-kendala serta masalah-masalah berkaitan dengan pengawas sekolah yang ada di Pusbantendik, Badan PSDMPK dan PMP, Kemdikbud, di antaranya:

(1) masih banyaknya pengawas yang belum memenuhi kualifikasi persyaratan pendidikan minimal, khususnya pengawas sekolah dasar; (2) sistem rekrutmen belum berdasarkan kompetensi; (3) jabatan dan karir pengawas belum dioptimalkan dan dihargai; (4) belum ada kegiatan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan dan terprogram; (5) program, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan belum terpola dan terprogram dengan baik; (6) laporan pengawasan belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan; (7) belum ada program induksi bagi pengawas sekolah pemula; dan (8) fasilitas dan daya dukung kerja pengawas sekolah belum memadai. (*Grand Design Pengembangan Pengawas Sekolah Indonesia*, Pusbantendik, 2011:2)

Selain hasil uji kompetensi dan masalah pengawas yang terdapat dalam dokumen Pusbantendik di atas, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan oleh guru ketika pengawas sekolah melakukan supervisi akademik masih rendah dan belum bermakna sebagaimana hasil penelitian Sudin (2008:3) membuktikan bahwa implementasi supervisi akademik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh pengawas sekolah dampaknya masih belum memuaskan. Titik persoalannya adalah belum optimalnya pelaksanaan supervisi akademik terhadap proses pembelajaran.

Hasil penelitian Ruswenda (2011:114) menunjukkan ada persoalan lain karena kegiatan penyusunan program dan laporan hasil pengawasan, kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru tidak sesuai dengan pedoman tugas pengawasan. Faktor penyebabnya adalah motivasi, komitmen dan kemampuan pengawas rendah, komunikasi tidak lancar, upaya pemberdayaan, kompleksitas dan beban kerja pengawas berat, dan budaya sekolah tidak mendukung. Juga tingkat profesionalisme dan frekuensi dalam melaksanakan supervisi akademik (Hubullah, 2012:142). Sedangkan dalam konteks

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemberdayaan pengawas sekolah untuk meningkatkan atau dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah, penelitian Darjat (2008:vi) membuktikan belum seluruh pengawas sekolah memiliki dan melaksanakan kompetensi seperti yang dipersyaratkan.

Dalam kaitan dengan kinerja pengawas sekolah, Arifiatun (2009:vii) menemukan bahwa kinerja supervisi yang dilakukan pengawas sekolah belum mempunyai hubungan signifikan terhadap kinerja profesional guru. Hal ini mengindikasikan bahwa bahwa kinerja pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik yang masih perlu ditingkatkan. Penyebab lain lemahnya kinerja pengawas adalah minimnya rasio jumlah pengawas dibanding dengan jumlah sekolah yang harus dibina berpengaruh pada rendahnya frekuensi pengawas sekolah melaksanakan tugas supervisi ke sekolah binaannya, apalagi jika daerah tersebut memiliki kendala geografis.

Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa permasalahan pengawas sekolah bukan hanya berkaitan dengan lemahnya kompetensi yang harus dimiliki tetapi juga perlunya pengembangan dan pemberdayaan pengawas sekolah yang optimal dan profesional. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah yang mampu memenuhi kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah.

Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai supervisor akademik idealnya menjadi panutan dan teladan para guru, karena keberadaan pengawas sekolah di tengah-tengah mereka menjadi inspirator bagi guru untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas pokoknya. Realitanya, masih banyak pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas ini belum optimal dan belum berdampak pada peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Mukhtar dan Iskandar (2009:39) mengatakan bahwa pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas di sekolah belum efektif sehingga belum memberi kontribusi yang memadai untuk meningkatkan mutu layanan belajar, alasan

utamanya bertumpu pada dua hal yaitu pertama beban kerja pengawas terlalu berat, kedua latar belakang pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang studi yang disupervisi. Akibatnya, di lapangan beberapa guru merasakan kehadiran pengawas di tengah-tengah mereka tidak dapat membantu memperbaiki dan mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas pengajaran yang dihadapinya. Bahkan dalam praktiknya pengawas lebih sering menekankan pada tanggung jawab administratif guru. Artinya dalam melaksanakan supervisi akademik pengawas hanya memeriksa kelengkapan administrasi pengajaran guru. Kondisi ini tentunya memerlukan kepedulian semua pihak, khususnya optimalisasi peran tugas Pusbangtendik yang memiliki kewenangan dalam pembina pengawas sekolah.

Pelaksanaan supervisi akademik semestinya juga dilakukan berdasarkan data, fakta dan informasi yang objektif dan ditunjang dengan prinsip kolaborasi dan hubungan kesejawatan antara pengawas sekolah, guru dan kepala sekolah dengan menjunjung tinggi harga diri dan martabat masing-masing. Karena suasana dan berhubungan yang dibangun secara akrab dan hangat atas dasar saling menghargai dan menghormati dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan supervisi akademik sehingga dapat mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal ini senada dengan hasil penelitian Awuah (2011:202) tentang bentuk supervisi pembelajaran yang diminati oleh guru dan kepala sekolah, yaitu:

“...nature of supervision of instruction desired by both teachers and heads can be characterised as considerably more contemporary than currently experienced (administrative and managerial roles) than aspects of instructional supervision that related to monitoring teaching activities and ensuring maximum use of instructional time.”

Hasil penelitian ini mengingatkan bahwa bentuk supervisi yang diminati oleh guru dan kepala sekolah adalah supervisi kontemporer yang lebih menekankan pada aspek proses pembelajaran, memonitor bagaimana aktivitas pengajaran, dan meyakinkan bagaimana menggunakan waktu pembelajaran secara maksimum.

Permendiknas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kemdikbud menunjukkan bahwa Pusbangtendik merupakan bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pengembangan tenaga kependidikan dan pegawai di lingkungan Kementerian. Dalam konteks melaksanakan tugas berkaitan dengan pengawas sekolah sebagai salah satu tenaga kependidikan, Pusbangtendik menyelenggarakan fungsi, diantaranya:

- (a) penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan tenaga kependidikan pengawas sekolah; (b) penyusunan program pengembangan tenaga kependidikan pengawas sekolah; (c) penyusunan bahan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan; (d) fasilitasi pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan pengawas sekolah; (e) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan tenaga kependidikan pengawas sekolah.

Dengan demikian program pelatihan pengawas sekolah merupakan salah satu kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pusbangtendik. Kewenangan ini merupakan tugas dari Bidang Pengembangan Tenaga Teknis dan Fungsional Non-Pendidik, karena menurut tugas pokok dan fungsinya Bidang tersebut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan program pengembangan tenaga teknis dan fungsional nonpendidik serta bahan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan tenaga teknis dan fungsional nonpendidik. Bidang ini secara rinci menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan bahan kebijakan teknis; (b) penyusunan program; (c) penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan; (d) fasilitasi pelaksanaan; (e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; dan (e) penyusunan laporan pelaksanaan program.

Berdasarkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab tersebut, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengawas sekolah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pusbangtendik beserta bidang dan seksi yang relevan lainnya untuk memecahkan solusi seperti masih lemahnya kompetensi supervisi akademik yang dimiliki oleh pengawas sekolah.

Solusi-solusi yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan masalah kurangnya kompetensi supervisi akademik dan permasalahan lainnya adalah dengan

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengoptimalkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan pelatihan pengawas sekolah dengan fokus pada tujuan, materi dan strategi yang belum banyak tersentuh sesuai kebutuhan pengawas sekolah, di antaranya adalah (1) pengembangan silabus dan kurikulum pelatihan pengawas sekolah; (2) pengembangan bahan ajar peningkatan kompetensi supervisi akademik; (3) pengembangan tes kompetensi dan pemetaan kompetensi pengawas; (4) memperbanyak pelatihan untuk pelatih (*training of trainer*) untuk meningkatkan kualitas pelatihan pengawas; (5) pengembangan sistem penilaian kinerja pengawas sekolah dan pemetaannya; dan (6) pengembangan kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan pengawas sekolah; serta (7) program induksi bagi pengawas sekolah pemula. (Grand Desain Pengembangan Pengawas Sekolah, Pusbantendik 2011:5).

Perubahan paradigma dalam pengawasan sekolah patut mendapat perhatian, karena banyak pengawas yang belum mendapatkan kesempatan untuk menerima wawasan dan keterampilan baru dalam praktek pengawasan sekolah melalui pendidikan dan pelatihan kepengawasan seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusbantendik. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut dibanding dengan jumlah pengawas sekolah yang ada.

Berkaitan dengan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, dan disusul dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kebijakan ini berimplikasi pada semakin menantangnya peran semua pihak yang terlibat dalam praktek pendidikan baik pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah dan guru tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum melainkan juga menjadi pengembang kurikulum pada tingkat satuan pendidikan masing-masing yang tentunya di bawah pembinaan, pemantauan dan penilaian pengawas sekolah.

Selain itu lahirnya Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar

Kompetensi Pengawas, Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga peraturan ini berisi dimensi-dimensi kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pengawas, kepala sekolah dan guru untuk melakukan tugas pokok masing-masing.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru di atas saling berkorelasi antara satu dan lainnya baik dilihat dari substansi maupun hierarki. Secara substansi masing-masing kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru memiliki esensi yang sama, sedangkan secara hierarki pengawas sekolah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kepala sekolah, demikian juga kedudukan kepala sekolah lebih tinggi dari guru. Dengan demikian pengawas sekolah memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan kepala sekolah memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi guru, dan akhirnya guru memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Korelasi-korelasi tersebut dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1 Korelasi Kompetensi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa

Sumber: Direktorat Tenaga Kependidikan, Depdiknas (Ditendik, 2010b:10).

Gambar tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dan peran

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Tentunya jika masih terdapat masalah yang berkaitan dengan kompetensi pengawas sekolah akan memiliki dampak kompetensi kepala sekolah, guru, dan siswa. Hal ini juga akan berdampak pada upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berkaitan dengan lemahnya kompetensi yang dimiliki oleh pengawas sekolah serta korelasi kompetensi dengan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya diperlukan adanya upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah di antaranya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan prajabatan (*preservice training*) maupun pendidikan dalam jabatan (*inservice training*). Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokoknya, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik) memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya harus mengoptimalkan peran sentral tersebut untuk menghasilkan pengawas sekolah yang professional yang ditandai dengan terpenuhinya kompetensi yang dibutuhkan oleh pengawas tersebut dalam melakukan tugas pokoknya.

Kaitan dengan analisis kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam menentukan tujuan pelatihan, proses menentukan kurikulum pelatihan tersebut paling tidak mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar belajar (*basic learning needs*) peserta pendidikan dan pelatihan. Kebutuhan dasar tersebut menurut UNESCO tahun 1996 meliputi *esential learning tools* yang lengkapnya berbunyi

These needs comprise both essential learning tools (such as literacy, oral expression, numeracy, and problem solving) and the basic learning content (such as knowledge, skills, values, and attitudes) required by human beings to be able to survive, to develop their full capacities, to live and work in dignity, to participate fully in development, to improve the quality of their lives, to make informed decisions and to continue learning" (UNESCO, 1996:1).

Hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan pentingnya *basic learning needs* yang telah menjadi isu utama dalam Konferensi Internasional tentang Pendidikan untuk Semua (*World Conference on Education for All*) tahun 1990 di Thailand.

Selain mempertimbangkan *basic learning needs* tersebut, tentunya proses

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mendesain suatu kurikulum pelatihan harus mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan atau jenis profesi tertentu, seperti kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan fungsional pengawas sekolah, dengan harapan hasil pelatihan akan meningkatkan profesionalisme dan kinerja pengawas sekolah tersebut.

Dalam tataran implementasi, kurikulum pelatihan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses metode dan pendekatan pembelajaran. Salah satunya adalah aspek karakteristik peserta pelatihan. Karakteristik peserta ini akan berimplikasi pada pemilihan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan.

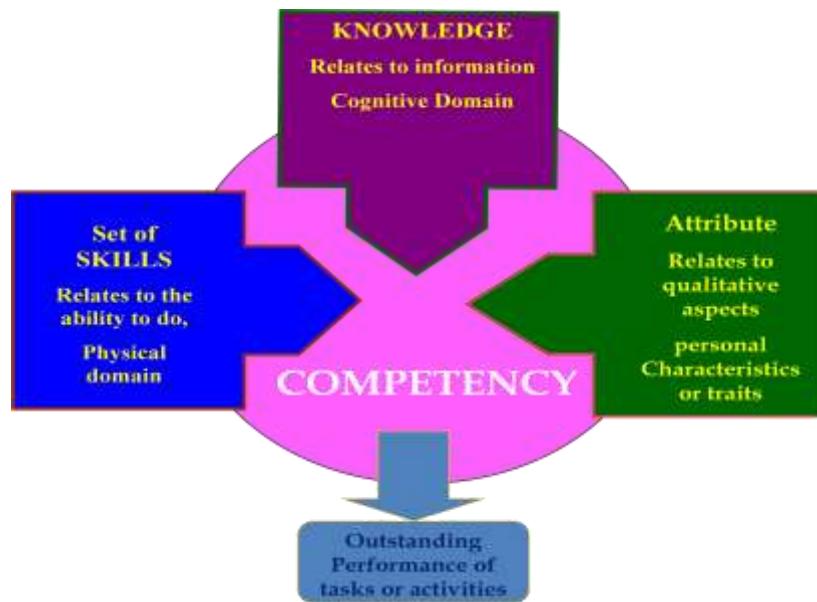
Sehubungan dengan peserta pelatihan pengawas sekolah pada umumnya adalah orang dewasa, pengembangan pendekatan pembelajaran sebagai bentuk implementasi desain kurikulum pelatihan harus mengacu pada pendekatan pembelajaran andragogi. Dalam pandangan Sims & Sims seperti dikutip Chaves (2006:148) pendekatan andragogi (*androgogical approaches*) dalam pembelajaran adalah “*based on the learners' needs and interests so as to create opportunities for the learners to analyze their experience and its application to their work and life*”. Selanjutnya Chaves (2006:148) menyatakan bahwa ada sembilan karakteristik yang menjadi pembeda pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) yaitu:

“(1) peserta didik disebut partisipan atau pembelajar (*learner*), (2) cara belajar bersifat otonom dan mandiri, (3) tujuan pembelajaran bersifat fleksibel, (4) diasumsikan bahwa setiap peserta didik dapat berkontribusi sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya, (5) mempergunakan metode pembelajaran aktif, (6) peserta didik memberikan pengaruh terhadap kecepatan proses pembelajaran dalam konteks *a learner-centered approach*, (7) keterlibatan peserta didik menjadi kunci utama keberhasilan, (8) pembelajaran berpusat pada problem kehidupan nyata, (9) peserta didik dipandang sebagai sumber yang utama pengembangan ide dan contoh-contoh.” (Chaves, 2006:148).

Mengacu kepada karakteristik pembelajaran orang dewasa di atas, suatu aktifitas pelatihan seperti pelatihan pengawas sekolah perlu ditunjang dengan keterampilan belajar (*learning skill*). Peserta pelatihan yang memiliki keterampilan belajar akan mampu melaksanakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta mampu memenuhi tugas dan penilaian yang diberikan dalam pelatihan.

Selain itu tujuan dan konten atau materi kurikulum pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek materi pelatihan, tetapi juga mencakup sistem penyampaian materi pelatihan yang harus diprogramkan dan dilaksanakan. Sehingga materi dan sistem pelatihan ini benar-benar bermakna untuk penyegaran, penguatan dan peningkatan bahkan pembentukan kompetensi baru yang bermanfaat bagi pengawas sekolah ketika melaksanakan tugas pokoknya.

Sesuai dengan konsep *Competency Approach to Human Resource Management* atau pengelolaan sumber daya manusia dengan pendekatan kompetensi, kompetensi yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, sebagaimana dikemukakan dalam gambar berikut:



Gambar 1.2 Korelasi Kompetensi dan Kinerja

Sumber: www.http:xa.yimg.com

Dengan demikian tingkat kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokok supervisi akademik, sangat tergantung pada pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki pengawas sekolah tersebut.

Kurikulum pelatihan pengawas sekolah semestinya dirancang secara

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

komprehensif dengan mengacu pada tuntutan dan kebutuhan peningkatan kompetensi pengawas sekolah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Berdasarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah tahun 2010 dinyatakan bahwa:

(1)Fokus tujuan pelatihan penguatan pengawas sekolah belum memenuhi semua kompetensi yang dibutuhkan oleh pengawas sekolah, khususnya aspek kompetensi supervisi akademik secara utuh sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui Permendiknas No. 12 Tahun 2007; dan (2) alokasi waktu yang masih kurang untuk peningkatan supervisi akademik dibanding dengan materi pelatihan lainnya. (Ditendik, 2010:9)

Hal ini menunjukkan perlu adanya kajian ulang terhadap kurikulum pelatihan penguatan pengawas yang ada di Pusbangtendik, dengan harapan dapat dihasilkan suatu tahapan atau proses pengembangan kurikulum dan dokumen kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah yang mampu dengan secara efektif dan efisien dapat diserap dengan mudah oleh seluruh peserta pelatihan penguatan pengawas sekolah secara langsung, dan dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh pengawas sekolah.

Tahapan tersebut tentunya harus mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli. Salah satu model yang relevan dengan pendapat para ahli pelatihan adalah perencanaan kurikulum yang diajukan oleh Taba (1962:12) dalam bukunya *Curriculum development: theory and practice* yang terdiri dari tujuh langkah linier dalam perencanaan kurikulum, yaitu:

“...(1) diagnosis of the needs, (2) formulation of objectives, (3) selection of content, (4) organization of content, (5) selection of learning experiences, (6) organization of learning experiences, dan (7) determination of what to evaluate and of ways and means of evaluating.”

Dengan demikian, kurikulum pelatihan perlu dikembangkan berdasarkan tahapan yang dimulai dari diagnosis atau analisis kebutuhan, merumuskan tujuan, seleksi materi, organisasi materi, seleksi pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan menentukan apa yang dievaluasi dan cara serta alat evaluasinya.

Terdorong oleh keinginan untuk memeroleh gambaran dan mempelajari lebih jauh tentang proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mampu memenuhi kompetensi supervisi akademik yang dibutuhkan oleh pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Proses Pengembangan Kurikulum Pelatihan Pengawas Sekolah untuk Meningkatkan Kompetensi Supervisi Akademik" yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDMPK&PMP, Kemdikbud.

B. Fokus Kajian Penelitian

Sebagai mana dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada kajian proses pengembangan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah di Pusbangtendik, Badan PSDMPK&PMP, Kemdikbud. Fokus kajian penelitian ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian sebelumnya dan beberapa hasil identifikasi masalah yang bersumber dari laporan dan beberapa panduan pelatihan pengawas sekolah sebelumnya yang dilakukan lembaga di lingkungan Kemdikbud dan lembaga terkait lainnya seperti PPPPTK dan LPMP, misalnya Panduan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dalam Pembimbingan Guru, Ditendik, Dirjen PMPTK, Depdiknas tahun 2009, Panduan Diklat Pengawas Sekolah, Dirjen PMPTK, LPMP Jabar tahun 2010, Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah tahun 2010, Panduan Fasilitasi Bimtek Pengawas Sekolah, Dirjendikdas, Kemdiknas tahun 2011 ditemukan bahwa:

1. Pelatihan pengawas sekolah belum memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kompetensi pengawas sekolah, khususnya supervisi akademik.
2. Desain kurikulum pelatihan pengawas sekolah belum merepresentasikan kompetensi yang dibutuhkan pengawas sekolah dalam melakukan tugas pokok supervisi akademik yang spesifik.
3. Perencanaan dan pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah belum mengacu pada kebutuhan pengawas sekolah yang sesungguhnya untuk melakukan tugas pokoknya karena belum diawali dengan analisis kebutuhan

- pelatihan secara khusus.
4. Model dan strategi pembelajaran kegiatan pelatihan pengawas sekolah belum efektif dan efisien untuk menunjang pencapaian tujuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang utuh karena cenderung lebih menekankan pada aspek pengetahuan melalui paparan.
 5. Tujuan pelatihan pengawas sekolah belum memenuhi semua kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan stander kompetensi yang telah ditetapkan, khususnya kompetensi supervisi akademik.
 6. Kegiatan pelatihan pengawas sekolah belum banyak diikuti dengan *follow up* dan *feedback* seperti prinsip *In Service Learning 1 - On the Job Learning - In Service Learning 2*.
 7. Evaluasi pelatihan belum dilakukan secara komprehensif pada kompetensi tertentu, khususnya supervisi akademik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas diperlukan proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah yang efektif, efisien, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pokok dan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan produktifitas pengawas sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan kajian khusus berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut di atas, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya, perlu kajian tentang proses *Training Need Assessment (TNA)* kurikulum pelatihan pengawas sekolah.
2. Untuk meningkatkan kebermaknaan dan pedoman arah pelatihan, perlu dikaji tentang rumusan tujuan kurikulum pelatihan pengawas sekolah, khususnya untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik.
3. Untuk kesesuaian pelaksanaan pelatihan dan kebutuhan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan kajian terhadap kecukupan dan pengembangan materi pelatihan kurikulum pelatihan pengawas sekolah.
4. Untuk melihat kualitas proses pelatihan pengawas sekolah yang sesuai dengan

tujuan kurikulum pelatihan yang digunakan, dibutuhkan kajian terhadap strategi implementasi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah.

5. Untuk meningkatkan dampak dan relevansi hasil pelatihan pengawas, dibutuhkan analisis prosedur evaluasi dan indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan pelatihan pengawas sekolah sesuai dengan kurikulum pelatihan yang digunakan.

Berdasarkan kelima kajian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini menghasilkan suatu gambaran yang utuh tentang proses pengembangan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, khususnya untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah yang dilakukan oleh Pusbangtendik, Badan PSDMPK&PMP, Kemdikbud.

Fokus kajian dalam proses pengembangan proses pengembangan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik ini dibatasi pada uraian dimensi kompetensi supervisi akademik yang harus dimiliki pengawas sekolah sebagaimana tercantum Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah dan Madrasah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, permasalahan pokok penelitian ini, dirumuskan dengan pertanyaan berikut: “Bagaimana proses pengembangan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik di Pusbangtendik, Badan PSDMPK&PMP, Kemdikbud?”

Untuk lebih memudahkan proses kajian terhadap pertanyaan penelitian tersebut, rumusan masalah penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses *Training Need Assessment (TNA)* kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik?
2. Bagaimanakah proses perumusan tujuan kurikulum pelatihan penguatan

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik?

3. Bagaimanakah proses pengembangan materi pelatihan kurikulum pelatihan penguatan pengawas untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik?
4. Bagaimanakah proses implementasi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik?
5. Bagaimanakah proses evaluasi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik?

D. Tujuan penelitian

Beranjak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran tentang proses pengembangan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik yang dilakukan di Pusbangtendik, Badan PSDMPK&PMP, Kemdikbud. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan fenomena tentang:

1. Proses *Training Need Assessment (TNA)* pengembangan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk menungkatkan kompetensi supervisi akademik.
2. Proses perumusan tujuan pelatihan pengembangan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk menungkatkan kompetensi supervisi akademik.
3. Proses pengembangan materi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah; untuk menungkatkan kompetensi supervisi akademik.
4. Proses implementasi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk menungkatkan kompetensi supervisi akademik;
5. Proses evaluasi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk menungkatkan kompetensi supervisi akademik;

E. Manfaat Penelitian

Pelatihan penguatan pengawas sekolah memiliki peran yang sangat

Darwis, 2014

Proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

signifikan dalam peningkatan standar kompetensi yang dibutuhkan pengawas sekolah, dalam melaksanakan tugas pokoknya, khususnya kompetensi supervisi akademik yang akan meningkatkan kinerja pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran guru. Oleh karena itu hasil temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap aspek-aspek berikut:

1. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Bagi aspek pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan bahan pemikiran tentang konsep dan teori pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokoknya yang dapat diaplikasikan dalam *training need Assessment*, perumusan tujuan, pengembangan materi, implementasi, serta evaluasi kurikulum pelatihan pengawas.

2. Aspek manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan praktis dalam menyusun panduan, mekanisme, prosedur pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum pelatihan pengawas sekolah sekaligus dapat menjadi kebijakan bagi Badan PSDMPK&PMP dan lembaga di bawahnya seperti LPMP dan PPPPTK serta lembaga penyelenggara pendidikan pelatihan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebupaten/Kota serta institusi terkait lainnya dalam proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya yang terinci diawali proses analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan materi, strategi implementasi, sampai dengan prosedur atau metode evaluasinya.

3. Aspek pengembangan penelitian

Kaitan dengan aspek pengembangan penelitian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi untuk kegiatan penelitian relevan selanjutnya.

F. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini diuraikan dalam bentuk laporan penelitian dengan struktur organisasi komponen disertasi sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Kajian Pustaka
3. BAB III : Prosedur Penelitian
4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
5. BAB V : Kesimpulan, Implikasi, Dalil dan Rekomendasi